

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA OPD KOTA SURABAYA

Rizky Tri Yenita
rizkytriyenita96@gmail.com
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of disclosure of local financial statement, its accessibility, and performance audit on the accountability of local financial management. While, the research was quantitative. Moreover, the population was the Regional Apparatus Local Organization (OPD) in the Surabaya City government environment. Moreover, the data were primary. The data collection technique used purposive sampling instrument. Data collection techniques used in research are survey methods. In line with, there were 48 respondents as sample. Besides, the instrument in data collection used survey. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Services Solutions) 23.0. The research result is the disclosure of local financial statement had affected the accountability of local financial management, accessibility of regional financial reports had affected the accountability of local financial management, and performance audit had affected the accountability of local financial management. In other words, all variables had positive effect on the accountability of local financial management.

Keywords: disclosure of local financial statement, accessibility of local financial statement, performance audit, accountability of local financial management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei. Data yang digunakan adalah data primer yang dibagikan kepada responden. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 48 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*) versi 23.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan audit kinerja mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, audit kinerja, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik telah menjadi perhatian bagi para praktik dan akademi, hal ini disebabkan oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan pemberlakuan otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki wewenang dalam mengambil keputusan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Namun dengan adanya wewenang tersebut, bukan berarti pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kepentingan individu

tanpa ada arah dan tujuan yang jelas. Hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah, pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparansi baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia. Tiga misi utama otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang paling penting karena dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi, menilai dan memprediksi suatu kinerja instansi pemerintah. Pemerintah daerah harus dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, selain itu pemerintah harus menyajikan informasi laporan keuangan secara jelas. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nordian dan Hertianti, 2010).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah yaitu salah satunya hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Publikasi laporan keuangan atau aksesibilitas laporan keuangan dapat disampaikan melalui media seperti surat kabar, stasiun televisi, internet atau *website*.

Audit pada organisasi sektor publik tidak hanya mencakup audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun juga audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit tersebut. Menurut UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, pengertian audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Alasan pentingnya dilakukan audit kinerja adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, selain itu audit kinerja juga sebagai alat evaluasi dan pengarah dalam pengalokasian sumber dana masyarakat, karena dengan dilakukannya audit kinerja akan terwujud pengendalian terhadap kinerja dari pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah.

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan laporan keuangan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pengguna laporan keuangan. Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas dapat dikatakan efektif apabila informasi terkait dalam laporan keuangan tersebut mudah diakses oleh publik. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebaliknya jika penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya? (2) Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya? (3) Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya. (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya. (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, audit kinerja, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk dijadikan perbandingan dengan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada populasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini akan lebih terfokus pada masing-masing variabel guna mendapatkan penjelasan dan pemahaman tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan (*Agency Theory*) sudah mulai berkembang berawal dari adanya penelitian oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mengacu pada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Pembuatan keputusan oleh manajer perusahaan (*agent*) harus bisa diterima sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan segala konsekuensinya. Dalam teori keagenan (*Agency Theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut.

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai risiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009:17).

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: (1) Pemerintah pusat; (2) Pemerintah daerah; (3) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; (4) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*) (Mardiasmo, 2009:18). Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Audit Kinerja

Audit Pemerintah, khususnya Audit Kinerja merupakan kunci utama untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pertanggungjawaban kepada rakyat. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas (Harun, 2009). Fungsi yang melakukan aktivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Audit kinerja dapat dilaksanakan oleh external auditor maupun internal auditor. Sesuai amanat UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan mandat dan kewenangan kepada BPK – sebagai lembaga pemeriksa eksternal – untuk melaksanakan audit kinerja. Di sisi lain tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan audit kinerja, sebagai suatu bentuk pengawasan. Dengan demikian, auditor eksternal dan auditor internal perlu berkoordinasi dalam melaksanakan audit kinerja. Jangan sampai terjadi *overlapping*. Keduanya harus menjaga hubungan dan komunikasi yang harmonis agar tercipta konfigurasi audit kinerja yang baik.

Audit kinerja merupakan metamorfosis dari audit intern (internal audit) yang kemudian berkembang menjadi audit operasional (operational audit) dan selanjutnya menjadi audit manajemen (management audit). Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan

sebagai pengembangan diri audit keuangan. Audit kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga Pemerintah, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran yang kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena audit kinerja (*performance audit*) merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi: ekonomi, efisien dan efektivitas, maka auditor yang akan melaksanakan kegiatan harus memperoleh informasi tentang organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur kerja dan sistem informasi dan pelaporan keuangan dan kegiatan kepada manajemen.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) (Mardiasmo, 2009:20). Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2009:21).

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Mardiasmo (2009:24) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, antara lain: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana public; (2) Akuntabilitas proses (*process accountability*), yaitu akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi; (3) Akuntabilitas program (*program accountability*), yaitu akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal; (4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), yaitu akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD dan masyarakat luas.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordian dan Hertianti, 2010). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah berupa laporan keuangan daerah kepada pengguna laporan pemerintah. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi

terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2017) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa dengan penyajian laporan keuangan yang baik maka dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Agar pemerintah dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik maka pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Apabila pemerintah telah menyajikan laporan keuangan dengan baik tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahida (2015) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa dengan adanya kemudahan publik dalam memperoleh informasi keuangan daerah maka dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

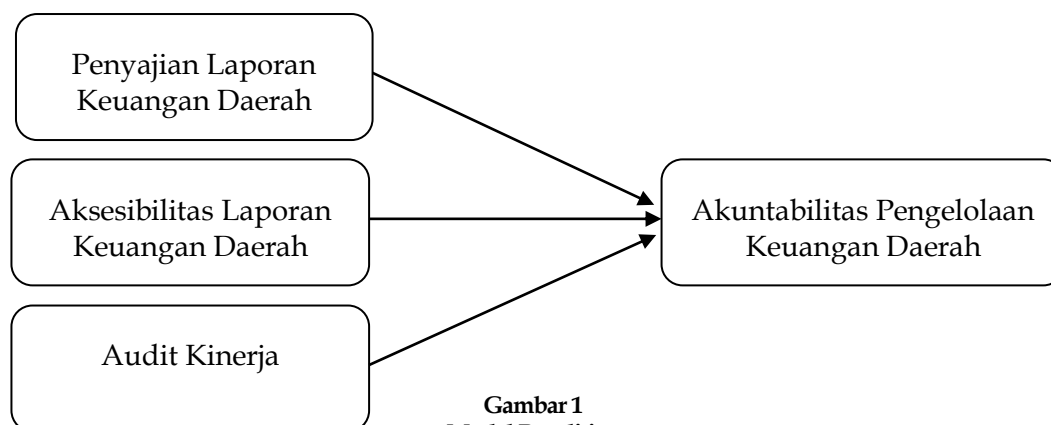
Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait. Hubungan dilakukannya audit kinerja terutama dibagian yang langsung terkait dengan penegelolaan keuangan dengan kualitas pelaporan dari laporan keuangan daerah akan sangat besar.

Pengaruh tersebut terkait dengan audit kinerja yang minitikberatkan kepada pemeriksaan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian yang menggambarkan kinerja dari pegawai yang terkait dengan pengelolaan laporan keuangan mulai dari penganggaran, penggunaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pemerintah atas dana masyarakat yang dikelolanya. Pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan dibuktikan oleh hasil penelitian Chandra dan Maestro (2013) yaitu audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan tergolong metode kausal (*causal research*). Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:13). Penelitian kausal merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain yang mempunyai hubungan sebab akibat (Sugiyono, 2014:74).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:61). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah cara peneliti mengambil sampel atau contoh yang representatif dari populasi yang tersedia (Sanusi, 2014:88). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*, cara pengambilan sampel tipe ini disebut pula dengan *judgement saping* yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sanusi, 2014:95). Penelitian ini mengambil populasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Surabaya, jumlah OPD Kota Surabaya adalah 56 OPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 18 Dinas, 7 Lembaga Teknik/Badan/Bagian, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik "*purposive sampling*" yang berarti bahwa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Berikut kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti: (1) Berdasarkan pertimbangan terkait dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya; (2) Dinas/Badan yang terdaftar dalam www.surabaya.go.id; (3) Kepala Dinas/Badan/ Bagian di OPD Kota Surabaya; (4) Bekerja di lingkungan Pemda Kota Surabaya lebih dari lima tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei yang dimana metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis (Sanusi, 2014:105). Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:199).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel independen dalam penelitian adalah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan daerah: (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; (4) dapat dipahami. Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan suatu daerah. Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan daerah: (1) keterbukaan; (2) kemudahan; (3) *accessible*.

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas. Terdapat 2 indikator yang mempengaruhi audit kinerja: (1) audit program (audit efektivitas); (2) audit ekonomi dan efisiensi (manajemen dan *oprational* audit). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pengguna laporan keuangan. Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum; (2) akuntabilitas proses; (3) akuntabilitas program; (4) Akuntabilitas kebijakan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) yang bertujuan untuk menentukan pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen atau pernyataan yang ada di kuesioner. Suatu instrumen atau pernyataan yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Pengujian validitas menggunakan ketentuan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% maka pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut

Ghozali (2005:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linier berganda yang merupakan alat ukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2011:96). Penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen dan 1 variabel, sehingga menggunakan persamaan regresi linier berganda. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$APKD = a + \beta_1 PLKD + \beta_2 ALKD + \beta_3 AK + e$$

Keterangan :

APKD : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

a : Konstanta

$\beta_1; \beta_2; \beta_3$: Slope atau Koefisien Regresi

PLKD : Penyajian Laporan Keuangan Daerah

ALKD : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

AK : Audit Kinerja

E : *Error*

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, variabel dependen atau keduanya terdistribusi (sebarannya) normal atau tidak normal Ghozali (2005: 147). Data dikatakan baik apabila mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik menggunakan *non-parametrik kolmogorov-smirnov (1-sample K-S)*. Jika hasil *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi (Ghozali, 2005: 41). Jika terjadi korelasi, berarti terjadi masalah multikolinieritas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, penelitian ini menggunakan teknik *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*

Pengujian Model Penelitian

Uji Kelayakan Modal (Uji Statistik F) digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka secara bersama-sama seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali,

2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : (1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik ($r_{product\ moment} > r_{tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Pengujian kualitas data dilakukan dengan sampel uji coba sebanyak 48 orang. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai $r_{product\ moment}$ dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$ dan n adalah jumlah sampel yaitu (df) = $48 - 2 = 46$. Berikut ini adalah uji validitas dengan program SPSS versi 23.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	$r_{product\ moment}$	r_{tabel} ($\alpha=5\%$)	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	APKD1	0,636	0.2845	Valid
	APKD2	0,662	0.2845	Valid
	APKD3	0,452	0.2845	Valid
	APKD4	0,611	0.2845	Valid
	APKD5	0,832	0.2845	Valid
	APKD6	0,453	0.2845	Valid
	APKD7	0,520	0.2845	Valid
	APKD8	0,475	0.2845	Valid
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	PLKD1	0,517	0.2845	Valid
	PLKD2	0,888	0.2845	Valid
	PLKD3	0,910	0.2845	Valid
	PLKD4	0,889	0.2845	Valid
	PLKD5	0,743	0.2845	Valid
	PLKD6	0,802	0.2845	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	ALKD1	0,707	0.2845	Valid
	ALKD2	0,772	0.2845	Valid
	ALKD3	0,640	0.2845	Valid
Audit Kinerja	AK1	0,700	0.2845	Valid
	AK2	0,654	0.2845	Valid
	AK3	0,740	0.2845	Valid
	AK4	0,811	0.2845	Valid
	AK5	0,859	0.2845	Valid
	AK6	0,786	0.2845	Valid

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai $r_{product\ moment}$ lebih besar dari r_{tabel} ($r_{product\ moment} > 0.2845$).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghazali (2005:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai *cronbach's alpha* dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha (a)	Koefisien alpha	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,720	0,60	Reliabel
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0,886	0,60	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	0,609	0,60	Reliabel
Audit Kinerja	0,844	0,60	Reliabel

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu keterandalan pelaporan keuangan daerah 0,721, kapasitas sumber daya manusia sebesar 0,758, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,905 dan pengawasan keuangan sebesar 0,659. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini pengukuran data sudah dapat dipercaya (*reliable*).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota surabaya. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah di isi oleh responden, diolah dengan menggunakan SPSS versi 23.0 dengan menggunakan hasil perhitungan yang tersaji pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Unstandardized Coefficients				
Model	B	Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	2.009	4.507	.446	.658
PLKD	.533	.086	6.184	.000
ALKD	.529	.210	2.524	.015
AK	.460	.086	5.341	.000

a. Dependent Variable: APKD

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3, maka penjelasan keterandalan pelaporan keuangan daerah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$APKD = 2,009 + 0,533PLKD + 0,529ALKD + 0,460AK + e$$

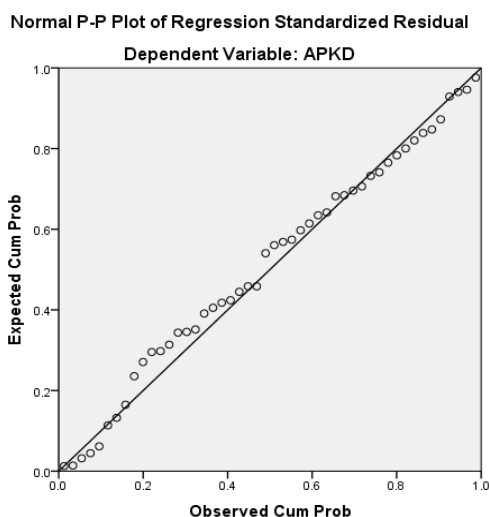
Persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan memiliki koefisien yang bertanda positif. Penjelasan untuk persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut: (1) Nilai koefisien PLKD sebesar 0,533, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel PLKD dengan variabel APKD. Hal ini dapat di interpretasikan bahwa jika penyajian laporan keuangan daerah semakin baik, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya jika penyajian laporan keuangan daerah semakin buruk, maka akan menurunkan akuntabilitas penyajian keuangan daerah; (2) Nilai koefisien ALKD sebesar 0,529, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel ALKD dengan variabel APKD. Hal ini dapat di interpretasikan bahwa jika aksesibilitas laporan keuangan daerah semakin baik, maka akan meningkatkan akuntabilitas penyajian keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya jika aksesibilitas laporan keuangan daerah semakin buruk, maka

akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (3) Nilai koefisien AK sebesar 0,460, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel AK dengan variabel APKD. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika audit kinerja semakin baik, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya jika audit kinerja semakin buruk, maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variable *dependen* (terikat) dan variable *independen* (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan Normal P-P Plot dan Diagram Histogram yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar disekitar garis diagonal. Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis diagonal seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2
Uji Normalitas
Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan pada gambar 2 *Normal P- P Plot Regression Standardized* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PLKD	,948	1,055
ALKD	,971	1,029
AK	,953	1,049

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL > 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahawa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas antar variabel.

Pengujian Model Penelitian

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan α sebesar 5%. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai F yang terlihat pada ANOVA tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	155,095	3	51,698	20,701	,000 ^b
1 Residual	109,884	44	2,497		
Total	264,979	47			

a. Dependent Variable: APKD

b. Predictors: (Constant), AK, ALKD, PLKD

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 5 maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 20,701 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R² sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,765 ^a	,585	,557	1,580

a. Predictors: (Constant), AK, ALKD, PLKD

b. Dependent Variable: APKD

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,585 atau 58,50%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan audit kinerja menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 58,50% sedangkan sisanya 41,50% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di ikut sertakan dalam model.

Uji Hipotesis

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Hal tersebut mengidentifikasi apakah masing-masing variabel bebas kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu keterandalan

pelaporan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS 23 didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	2.009	4.507	.446	.658
PLKD	.533	.086	6.184	.000
ALKD	.529	.210	2.524	.015
AK	.460	.086	5.341	.000

a. Dependent Variable: APKD

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 7 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (1) Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis pertama (H_1) diterima; (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan signifikan sebesar $0,015 < 0,05$ dan hipotesis kedua (H_2) diterima; (3) Audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas.

Berdasarkan pada Tabel 7 bahwa penyajian laporan keuangan menunjukkan arah yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel penyajian laporan keuangan daerah sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penyajian laporan keuangan daerah dilakukan dengan baik, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah harus menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar.

Dengan adanya penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan

keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Berdasarkan pada Tabel 7 bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah menunjukkan arah yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah sebesar $0,015 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wahida (2015) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitas dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Selain menyajikan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengakses laporan keuangan daerah, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik.

Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait (Agung, 2010).

Berdasarkan pada Tabel 7 bahwa audit kinerja menunjukkan arah yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel audit kinerja sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Chandra dan Maestro (2013) menyatakan bahwa audit kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika audit kinerja terutama dibagian yang langsung terkait dengan penegelolaan keuangan dengan kualitas pelaporan dari laporan keuangan daerah akan sangat besar telah dilakukan dengan baik, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya kinerja dari pegawai yang terkait dengan pengelolaan laporan keuangan mulai dari penganggaran, penggunaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pemerintah atas dana masyarakat yang dikelolanya.

Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah harus menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya; (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya; (3) Audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kinerja dari pegawai terkait mengenai pengelolaan laporan keuangan mulai dari penganggaran, penggunaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pemerintah atas dana masyarakat yang dikelola secara benar, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Untuk penelitian selanjutnya mempertimbangkan dalam menentukan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup provinsi dan memperbanyak sampel penelitian; (2) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden; (3) Penelitian ini masih terbatas pada variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan audit kinerja bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah misalnya sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R. I. G. 2010. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Grafindo. Jakarta.
- Chandra dan Maestro. 2013. Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi* 5(2):1-15
- Fauziyah, M. R. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Cetakan Keempat. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harun. R. M. 2009. *Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Jensen, M. and Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic*. Vol. 3(4):305-360
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi empat. Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, D. dan A. Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Sanusi, A. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta
- Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*. Universitas Hasannudin. Makassar.